

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan dijalankan oleh pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem beserta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan yang bersih, baik, transparan, bermartabat sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya merupakan harapan setiap pemerintah dan masyarakat masing-masing daerah. Salah satu fungsi penting dari pemerintahan yaitu pelayanan publik, pelayanan yang sesuai dengan harapan setiap daerah dalam memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, tepat serta transparan. Hal tersebut juga tidak lepas dari kontribusi masyarakat yang berpartisipasi melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai hajat hidup seluruh warga negara.

Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, disebutkan pelayanan publik yaitu segala aktivitas bertujuan memenuhi pelayanan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan untuk seluruh masyarakat serta penduduk berupa barang dan jasa serta pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu tujuan dalam pelayanan publik yaitu pelayanan dalam hal pemberian perizinan. Ada banyak

jenis pelayanan perizinan, begitu juga terkait perizinan dalam bidang usaha. Terkait dunia usaha, urusan perizinan penting dilaksanakan, salah satunya yaitu pengurusan izin pemasangan reklame.

Batam yang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas serta Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan kondisi serta karakteristik berbeda dari daerah Indonesia lainnya. Batam termasuk kategori daerah yang memiliki potensi dalam memaksimalkan kondisi perekonomian wilayah. Perlu dilakukan peninjauan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengeluarkan kebijakan peraturan daerah kota Batam. Dalam hal ini, penerimaan pajak perizinan khususnya pajak reklame yang bisa didapatkan dari izin mendirikan bangunan untuk pemasangan papan reklame (billboard) merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah kota Batam.

Upaya mempermudah masyarakat mengenai pengurusan izin reklame maka Pemerintah kota Batam sudah menggunakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK) dalam memudahkan akses dan menyederhanakan layanan perizinan reklame agar lebih cepat dan tidak rumit. Penerapannya dituangkan dalam bentuk aplikasi berbasis Android, e-reklame dan dilakukan evaluasi perizinan bagi perusahaan reklame yang membangun tidak sesuai dengan master plan, serta menertibkan yang tidak memiliki izin. Dengan adanya aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam pendataan, monitoring, dan evaluasi. Guna meningkatkan potensi maupun penerimaan Pajak Reklame serta bentuk upaya optimalisasi pendapatan Pajak Reklame. Aplikasi ini akan

menampilkan detail reklame. Mulai dari sebaran peta reklame, masa tayang, status tiang, maupun nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) reklame, dan *QR code*, agar setiap titik tiang reklame yang terpasang jelas kepemilikannya.

Berdasarkan hasil pendataan di awal tahun 2019, oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mencatat terhitung 830 titik tiang yang tersebar di sepanjang jalan utama atau arteri. Selain itu juga terdapat 45 titik tak bernama. Jenis tiang reklame yang didata meliputi billboard, videotron, dan megatron. Namun setelah melalui verifikasi, terdapat 903 titik tiang reklame. Terdiri dari billboard, videotron, megatron, mini billboard, polysign, dan wall billboard atau mural. Banyak ditemukan sekarang ini reklame yang sudah terpasang tetapi tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut data BP Batam, sebanyak 1.027 reklame di Batam, dan 723 di antaranya tidak memiliki izin. Kemudian ada sekitar 293 reklame memiliki izin namun 11 reklame tidak sesuai dengan masterplan.

Sesuai fenomena yang sudah dijelaskan di atas, perlu adanya inovasi pelayanan sektor publik khususnya dalam hal perizinan reklame guna memberikan solusi dalam pelayanan perizinan yang lebih mudah untuk menunjang kualitas pelayanan publik. Mengutip dari Jurnal Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, Dyah Mutiarin mengatakan bahwa suatu aspek terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan publik adalah dengan menerapkan sebuah terobosan inovasi yaitu pemerintah yang mampu memberikan pelayanan publik secara lebih berkualitas, mudah, efektif, efisien dan terjangkau sejalan dengan kebutuhan

setiap warga negara (Eldo & Mutiarin, 2019). Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “**Inovasi Layanan Perizinan Reklame di Kota Batam (studi tentang Layanan Sistem Informasi Manajemen Reklame)**”

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian fenomena diatas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai penelitian yaitu:

1. Bagaimana inovasi layanan perizinan sistem informasi manajemen reklame di kota Batam?
2. Apa faktor penghambat dalam inovasi layanan sistem informasi manajemen reklamed di kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis inovasi layanan perizinan sistem informasi manajemen reklamed di kota Batam
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam inovasi layanan sistem informasimanajemen reklame di kota Batam

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan yang

lebih spesifik pada ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam konsep Pelayanan Publik, Inovasi Layanan Publik dan E-Government.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi oleh pemerintah dan dinas terkait dalam inovasi layanan perizinan reklame kota Batam.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi serta menambah ilmu pengetahuan dalam hal inovasi layanan perizinan reklame untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di kota Batam khususnya kepada peneliti.

